

Penguatan *Sustainable Development Goals* Desa di Kabupaten Belu

Strengthening Village Sustainable Development Goals in Belu Regency

¹⁾Nurhidayati, ²⁾Dyah Purwanti, ³⁾IGMA Dharmakarja

^{1,3)}Program Studi D IV Manajemen Keuangan Negara,

²⁾Program Studi D IV Akuntansi Sektor Publik,
Politeknik Keuangan Negara STAN

Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15222, Indonesia

*corresponding authors: nurhidayati@pknstan.ac.id

DOI:

[10.30595/jppm.v8i1.20904](https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.20904)

Histori Artikel:

Diajukan:

19/01/2024

Diterima:

18/03/2024

Diterbitkan:

20/03/2024

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan konsep “think global act local” dari SDGs global yang menjadi tujuan pembangunan negara-negara di dunia. Nawacita Pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Capaian SDGs Desa Kabupaten Belu masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan dan menguatkan SDGs Desa memerlukan peran semua pihak, terutama dari perangkat desa itu sendiri. Oleh karena itu program pengabdian yang ditujukan kepada perangkat desa terutama kepala desa dan kepala urusan keuangan desa dalam rangka penguatan SDGs Desa. Metode pengabdian yang digunakan berupa pelatihan karena metode ini memang paling cocok untuk identifikasi dan penguatan awal literasi SDGs Desa. Setelah kegiatan pelatihan, pengetahuan peserta pelatihan terkait penerapan program SDGs Desa mengalami peningkatan. Akan tetapi keberlanjutan program pengabdian berupa monitoring implementasi dari kegiatan pelatihan perlu dilakukan agar tujuan kegiatan pelatihan tercapai secara paripurna.

Kata kunci: SDGs Desa; Pengelolaan Keuangan; Pelatihan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa is the concept of “think global act local” from the global SDGs which are the development goals of countries in the world. Nawacita for Indonesian Development is to develop Indonesia from underdeveloped, frontier and outermost areas. Belu Regency, as one of Indonesia’s underdeveloped, frontier and outermost regions, needs special attention from the government. Belu Regency Village’s SDGs achievements are still relatively low and need to be improved. To improve and strengthen the Village SDGs requires the role of all parties, especially the village officials themselves. Therefore, the empowerment

program is aimed at village officials, especially village heads and heads of village financial affairs in the context of strengthening SDGs Desa. We used training method because this method is most suitable for identifying and strengthening initial village SDGs literacy. After training activities, the training participants' knowledge about how to implement SDGs program increased. However, the sustainability of the service program in the form of monitoring the implementation of training activities needs to be carried out so that the objectives of the training activities are achieved completely.

Keywords: SDGs Desa; Financial Management; Training

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) dimana salah satu tujuan utamanya adalah menghapus kemiskinan ekstrim. Secara keseluruhan terdapat 17 tujuan yang tertuang dalam SDGs, meliputi dunia tanpa kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. SDGs yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini selanjutnya dituangkan menjadi SDGs nasional dengan 17 tujuan yang sama. Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs bukan hanya karena memenuhi kesepakatan global, akan tetapi juga dalam rangka mencapai cita-cita bangsa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021). SDGs ini menutup kelemahan MDGs yang

menggunakan pendekatan *top down*. SDGs mengedepankan pentingnya memulai proses pembangunan dengan melibatkan partisipasi dari bawah (Ngoyo, 2015).

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nasional tersebut, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengarusutamakan SDGs Desa (Iskandar, 2020). SDGs Desa ini selaras dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang juga digunakan oleh Kemendesa PDTT dalam mengukur tingkat kemandirian desa. SDGs Desa memiliki 18 tujuan yang harus dituntaskan pada tahun 2030, yaitu (1) Desa Tanpa Kemiskinan, (2) Desa Tanpa Kelaparan, (3) Desa Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Desa Berkualitas, (5) Keterlibatan Perempuan Desa, (6) Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, (7) Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, (8) Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, (9) Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, (10) Desa Tanpa Kesenjangan, (11) Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, (12) Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, (13) Desa Tanggap Perubahan Iklim, (14) Desa Peduli Lingkungan Laut, (15) Desa Peduli Lingkungan Darat, (16) Desa Damai Berkeadilan, (17) Kemitraan Untuk Pembangunan Desa, dan (18)

Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (Iskandar, 2020).

Kabupaten Belu sebagai kabupaten paling timur Indonesia yang langsung berbatasan dengan Timor Leste merupakan salah satu kabupaten yang mendapat perhatian pemerintah dengan adanya konsep nawacita, membangun dari pinggiran. Skor SDGs Desa Kabupaten Belu dalam dashboard Kemendesa PDTT adalah 48,08, dimana masih terbuka ruang pengembangan kegiatan untuk meningkatkan skor tersebut. Dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan tata kelola dalam bentuk reformulasi kebijakan maupun peningkatan literasi masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat (Suharman et al., 2021). Reformulasi kebijakan pada level desa dilaksanakan dalam bentuk rumusan penyusunan RPJM Desa maupun RKP Desa. DPMD Kabupaten biasanya yang akan melaksanakan monitoring implementasinya. Dalam rangka menguatkan SDGs Desa tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat kepada para pemangku kepentingan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan.

Dari skor rata-rata SDGs sebesar 48,08 tersebut, 3 (tiga) SDGs terbawah yang sangat perlu diperhatikan adalah (1) Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan dengan skor 4,97, (2) Desa Tanggap Perubahan Iklim dengan skor 6,27, dan (3) Desa Peduli Lingkungan Darat dengan skor 15,11. Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan nantinya terdapat penguatan SDGs Desa di Kabupaten Belu. Hasil identifikasi dengan mitra DPMD Kabupaten Belu, penguatan dimulai dari penguatan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah kepala desa dan kepala

urusan keuangan desa. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap potensi baik potensi alam maupun sumberdaya manusia. Dalam pelaksanaan Pembangunan partisipatif, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan di desanya (Hendiarwiandi, 2020). Kepala desa juga diharapkan dapat berperan sebagai kepala pemerintah, pengambil keputusan dalam perencanaan strategis, sebagai motivator, dan juga innovator (Sarpin, 2017). Sedangkan kepala urusan keuangan desa memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan dan penganggaran APB Desa, pelaksanaan, APB Desa, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Gafar et al., 2023). Atas dasar peran strategis kepala desa dan kaur keuangan desa itulah kegiatan pengabdian ini diperuntukkan kedua profesi tersebut.

Metode

Tujuan utama penguatan SDGs Desa di Kabupaten Belu ini adalah meningkatkan literasi dan kesadaran dari perangkat desa dan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Belu akan pentingnya SDGs Desa dalam kerangka pembangunan desa. sehingga metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang paling sesuai adalah metode pendidikan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah.

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Identifikasi Kebutuhan Mitra
 - 2) Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan, Kurikulum, dan Materi Pelatihan

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, yang akan dibahas adalah pelaksanaan kegiatan secara luring berupa kegiatan pelatihan dan diskusi langsung dengan DPMD Kabupaten Belu dan perangkat desa di seluruh Kabupaten Belu. Metode pengabdian yang digunakan berupa pelatihan yang terprogram. Pendidikan pelatihan terbukti mampu meningkatkan kompetensi pegawai sehingga berdampak positif bagi kinerja aparatur tersebut (Manalu, 2018).

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan keberlanjutan dari kegiatan pelatihan, senantiasa dilaksanakan koordinasi dan diskusi dengan DPMD Kabupaten Belu.

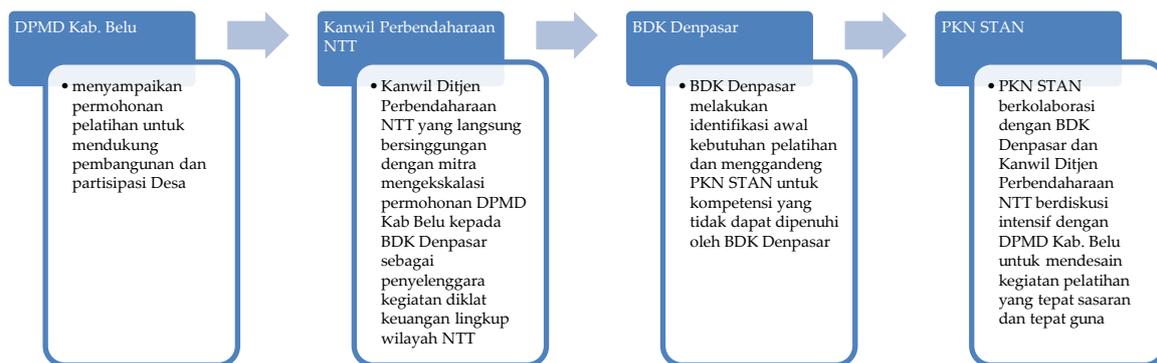
sesuai dengan kebutuhan mitra, dalam hal ini pihak DPMD Kabupaten Belu, tim pengabdian yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Balai Diklat Keuangan Denpasar, sangat intens melakukan diskusi-diskusi untuk mendesain kegiatan pelatihan yang tepat guna dan tepat sasaran. Gambar 1 menunjukkan proses kolaborasi Kemenkeu 1 dalam mengelola kebutuhan mitra dalam hal ini DPMD Kabupaten Belu.

Focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan antara PKN STAN, BDK Denpasar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, dan DPMD Kabupaten Belu dilaksanakan pada rentang bulan Mei s.d. Juni 2023. Hasil *focus group discussion* antara PKN STAN mitra dan seluruh pemangku kepentingan menghasilkan desain kebutuhan pelatihan sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Hasil dan Pembahasan Tahap Persiapan

Untuk menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

Gambar 1. Proses kolaborasi Kemenkeu 1 dalam mengelola kebutuhan mitra dalam hal ini DPMD Kabupaten Belu



Sumber: diolah penulis

Tabel 1 menjadi acuan dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan target para kepala desa dan kepala urusan keuangan desa di wilayah Kabupaten Belu.

Tabel 1. Kebutuhan Pelatihan

No	Sasaran	Kegiatan
1.	69 Kepala Desa	a. Pelatihan kepemimpinan,

No	Sasaran	Kegiatan
	seluruh Desa Kabupaten Belu	komunikasi, dan kerjasama yang efektif b. Pelatihan perencanaan pembangunan desa (berbasis SDGs Desa)
2.	Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa	a. Pelatihan perencanaan pembangunan desa (berbasis SDGs Desa) b. Pelatihan keuangan dan perpajakan desa
3.	DPMD Kabupaten Belu	a. FGD perencanaan pembangunan desa (berbasis SDGs Desa)

Sumber: diolah penulis dari hasil diskusi

Berdasarkan desain pelatihan pada Tabel 1, tim pengabdian menyusun kurikulum dan materi pelatihan. Secara garis besar, penyusunan jadwal pelatihan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pelatihan

Waktu	Materi	Keterangan
Hari I	FGD gambaran perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Belu dan penyiapan lokasi pelatihan	PKN STAN, BDK Denpasar, DPMD Kab. Belu Bertempat di ruang rapat DPMD Kab. Belu
Hari II	Pelatihan kepemimpinan,	Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Waktu	Materi	Keterangan
	komunikasi, dan kerjasama yang efektif untuk kelas Kepala Desa	NTT, BDK Denpasar, PKN STAN Bertempat di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu
	Pelatihan perencanaan pembangunan desa (berbasis SDGs Desa) untuk kelas Kaur Keuangan	PKN STAN Bertempat di aula Bappeda Kabupaten Belu
Hari III	Pelatihan perencanaan pembangunan desa (berbasis SDGs Desa) untuk kelas Kepala Desa	PKN STAN Bertempat di aula Sekretariat Daerah Kabupaten Belu
	Pelatihan keuangan dan perpajakan desa	PKN STAN dan Kemenkeu Satu NTT Bertempat di aula Bappeda Kabupaten Belu
Hari IV	Evaluasi kegiatan	Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, BDK Denpasar, PKN STAN Bertempat di aula KPPN Atambua

Sumber: diolah oleh penulis

Setelah menyusun identifikasi kebutuhan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian

menyusun kerangka acuan kegiatan dan materi pelatihan. Terkait dengan pelatihan perencanaan pembangunan desa (berbasis

SDGs Desa), tim menyusun kerangka materi sebagai berikut:

Tabel 3. Pokok Materi dan Metode Pelatihan

No	Pokok Materi	Metode
1.	Dimensi dan Prinsip SDGs Global	1. Perkenalan dan <i>ice breaking</i> 2. <i>Pretest</i> 3. Penyampaian materi interaktif 4. Praktik 5. Diskusi 6. <i>Posttest</i> 7. <i>Community of practice</i>
2.	SDGs Global dan SDGs Nasional	
3.	SDGs Desa dan Permendes 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4.	Penyusunan RKP Desa dengan Memanfaatkan Data Hasil SDGs Desa	
5.	Kegiatan-Kegiatan Sasaran SDGs Desa 1 s.d. 18	
6.	Praktik Penyusunan RKP Desa dan Pemetaan Kesesuaian Rancangan APBDesa dengan SDGs Desa	
7.	<i>Overview</i> Keselarasan SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun	
8.	<i>Overview</i> Pengelolaan Keuangan Desa	

Sumber: diolah oleh penulis

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan di kantor-kantor dinas Kabupaten Belu. Seluruh kepala desa dan kaur keuangan desa diundang bersamaan pada kegiatan tersebut. Kegiatan pelatihan dimulai pada 15 Juni 2023 pukul 09.00 WITA dan dibuka oleh Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. Pada pembukaan kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala desa dan kaur keuangan di wilayah Kabupaten Belu. Selain itu turut hadir jajaran Kemenkeu Satu Nusa Tenggara Timur di antaranya Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Balai Diklat Keuangan Denpasar, KPP Atambua, KPPN Atambua, dan KPPBC Atambua bersama PKN STAN sebagai wujud kolaborasi pendampingan penguatan keuangan di daerah. Pada sambutan pembukaannya,

Wakil Bupati Belu menyampaikan agar seluruh jajaran perangkat desa memanfaatkan sebaik-baiknya kegiatan pelatihan ini dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber. Agar dapat mengambil ilmu, Wakil Bupati juga berpesan agar jajaran perangkat desa terbuka hati dan pikiran. Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Catur Ariyanto Widodo, S.E., M.Int.Dev.Ec., dalam sambutannya menyampaikan bahwa terkait pengelolaa Dana Desa, penyalurannya di Kabupaten Belu relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kegiatan-kegiatan desa perlu diselaraskan dengan SDGs Desa yang juga menjadi tujuan pembangunan saat ini.

Gambar 2. Pembukaan Pelatihan



Gambar 3. Pelatihan SDGs Kaur Keuangan



Setelah kegiatan pembukaan, peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok kelas Kepala Desa dan kelompok kelas Kaur Keuangan. Untuk kelas Kepala Desa, pelatihan diselenggarakan di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Belu. Sedangkan kelas Kaur Keuangan diselenggarakan di aula Bappeda Kabupaten Belu. Pelatihan perencanaan pembangunan desa kepada Kaur Keuangan diperlukan dengan pertimbangan bahwa sebagai Kaur Keuangan tidak hanya sadar akan pertanggungjawaban keuangan saja, akan tetapi uang desa yang dikeluarkan telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Kegiatan pelatihan dimulai dengan permainan quizizz untuk pretest. Pretest ini dilakukan untuk identifikasi awal kemampuan dan pengetahuan seputar SDGs Desa. Dalam pretest tersebut, terdapat 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta pelatihan dengan memilih jawaban yang tepat di antara 4 (empat) pilihan jawaban.

Gambar 4. Skor SDGs Desa Kabupaten Belu



Tabel 4. Nilai Pretest dan Posttest

Peserta	Nilai Pretest	Nilai Posttest
Kaur Keuangan Desa Kab. Belu	40%	68%

Sumber: diolah penulis dari quizizz

Setelah kegiatan pretest, kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi interaktif. Pada pemaparan dan diskusi interaktif banyak langsung menggali ke skor SDGs Desa di Kabupaten Belu yang diakses melalui dashboard Kemendesa PDPT. Jika dilihat pada Gambar 4, skor SDGs Desa Kabupaten Belu adalah 48,08. Dari angka ini tentu masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendukung pencapaian SDGs Desa. Setelah sesi diskusi, peserta praktik langsung menyusun kegiatan yang dapat mendukung pencapaian SDGs Desa,

dari SDGs Desa 1 Desa Tanpa Kemiskinan hingga SDGs Desa 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Peserta dibagi menjadi 18 kelompok untuk merumuskan kegiatan yang mendukung masing-masing SDGs Desa. Setelah masing-masing kelompok menyusun program kegiatannya, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama-sama.

Gambar 5. Pembahasan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa



Sumber: Dashboard SDGs Desa
Kemendesa PDTT

Seluruh SDGs Desa dari SDGs Desa 1 sampai dengan SDGs Desa 18 masih perlu dikembangkan. Dari kegiatan pelatihan dan praktik, peserta cukup dapat mengusulkan dan merancang kegiatan dari masing-masing SDGs tersebut. Permasalahan di desa memang terkadang bukan pada ranah pelaksanaan kegiatan, akan tetapi mendokumentasikan kegiatan pada Dokumen SDGs Desa yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya dan Pemetaan Kesesuaian Rancangan APB Desa dengan SDGs Desa.

Selanjutnya, untuk menyelaraskan dengan tugas utama kepala urusan keuangan desa, pelatihan dilanjutkan dengan tahapan pengelolaan keuangan atas program kegiatan untuk mendukung

capaian SDGs Desa yang telah disusun sebelumnya. Hal-hal yang dibahas dalam pertanggungjawaban keuangan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Pada tahap perencanaan yang dibahas termasuk konsistensi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa sampai dengan pengaturan standar harga di desa. Pada tahap pelaksanaan keuangan meliputi pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, sampai dengan permasalahan yang mungkin muncul ketika tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan akan selaras dengan tahap penatausahaan dimana pada tahap penatausahaan meliputi administrasi pembukuan, cara SPJ kegiatan, dan bagaimana pencatatan kekayaan desa. Yang dibahas selanjutnya adalah tahap pelaporan. Pada tahap ini dibahas kapan, bagaimana, dan apa saja yang dilaporkan untuk menjaga akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Tahap akhir pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Pada tahap pertanggungjawaban, desa harus dapat menghasilkan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah ke desa. Pada level kepala desa, pelatihan SDGs Desa yang disampaikan lebih kepada kepemimpinan, kebijakan, dan pengambilan keputusan untuk pengusulan program atau kegiatan pada RKP Desa yang konsisten dengan RPJM Desa serta mendukung pencapaian SDGs Desa. Untuk pelatihan dengan peserta kepala desa, tidak diawali dengan pretest. Kegiatan diawali dengan memberikan grafik besar capaian SDGs Desa Kabupaten Belu dan menyandingkannya dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Para

kepala desa banyak memperlakukan mengapa harus ada isian dokumentasi IDM dan juga SDGs Desa. Memang sebenarnya IDM dan SDGs Desa ini isinya banyak yang beririsan. Pelatihan kepada kepala desa lebih difokuskan pada Pembangunan awareness kepada kepala desa tentang dokumentasi SDGs Desa maupun IDM. Indeks Desa Membangun sendiri merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks yaitu indeks ketahanan sosial (pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman), indeks ketahanan ekonomi (keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah), dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan (kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana). Perangkat indikator yang diimplementasikan untuk mengukur IDM dikembangkan menurut konsepsi dalam rangka mencapai desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi daya yang saling menguatkan dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Desa, 2020). Konsepsi ini selaras dengan SDGs Desa, sehingga IDM dapat diintegrasikan dengan data SDGs Desa. Kegiatan yang dilaksanakan dapat didokumentasikan sebagai capaian IDM maupun data SDGs Desa.

Gambar 6. Pelatihan SDGs Kepala Desa



Selanjutnya untuk memastikan program atau kegiatan tersebut berjalan sebagaimana mestinya tentu memerlukan kepemimpinan dan kebijakan kepala desa dalam menyukseskan program tersebut. Pada akhir pelatihan ini para kepala desa dibekali dengan konsep dan contoh kepemimpinan yang efektif, termasuk bagaimana mengkomunikasikan program kegiatan yang dilaksanakan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tahap Evaluasi dan Kelanjutan Kegiatan

Dengan selesainya kegiatan pelatihan, bukan berarti kegiatan pengabdian ini selesai. Evaluasi kegiatan pelatihan termasuk diskusi kelanjutan kegiatan perlu dilaksanakan agar tercapai tujuan secara paripurna. Evaluasi memiliki peran penting dalam program pendidikan dan pelatihan. Tanpa evaluasi, keberhasilan peserta diklat tidak dapat diketahui dan tanpa evaluasi mustahil ada perubahan ke arah yang lebih baik (Patimah, 2018). Hasil evaluasi kegiatan secara umum kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan dengan baik, peserta juga antusias hadir dan aktif dalam diskusi. Evaluasi dari DPMD Kabupaten Belu maupun Kemenkeu Satu NTT dan PKN STAN sepakat bahwa kegiatan serupa secara waktu dapat dikatakan sangat padat, kemudian untuk peserta yang dari

kepala urusan sebaiknya dapat menghadirkan bersamaan kepala urusan perencanaan, sehingga sinergi antara rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dengan pengelolaan keuangannya.

Gambar 7. Evaluasi dan Keberlanjutan Kegiatan



Catatan evaluasi untuk pelatihan dengan peserta para kepala desa antara lain beberapa kepala desa keberatan dengan level desa yang ditunjukkan pada peta IDM per Desa di Kabupaten Belu, meskipun hal tersebut disampaikan untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk membanding-bandingkan antar desa. Jika terdapat pelatihan serupa selanjutnya dapat disampaikan dalam bentuk lain. Memang memerlukan pendekatan yang berbeda ketika pelatihan yang diselenggarakan para pesertanya adalah level pimpinan.

SDGs Desa selaras dengan SDGs nasional maupun SDGs global, sehingga tujuan-tujuannya akan terus dievaluasi sampai dengan tahun 2030. Untuk keberlanjutan program, dari Kemenkeu Satu NTT-PKN STAN akan terus mendampingi Kabupaten Belu melalui DPMD Kabupaten Belu dalam perumusan program maupun *monitoring* capaian SDGs Desa Kabupaten Belu.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, metode, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Skor SDGs Desa Kabupaten Belu menunjukkan pada angka 48,08. Angka ini mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) bulan dari skor sebelumnya sebelum kegiatan pelatihan, yaitu 46,88. Berdasarkan angka ini, masih banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan dan didokumentasikan untuk pemetaan Rancangan APB Desa dengan SDGs Desa. Hasil diskusi dengan mitra yaitu DPMD Kabupaten Belu mengerucut pada kegiatan pengabdian berupa pelatihan kepada seluruh kepala desa dan kaur keuangan desa.

Pelatihan memberikan dampak jika diukur menggunakan nilai pretest dan posttest serta peningkatan kemampuan menyusun kegiatan berdasarkan masing-masing tujuan SDGs Desa, dari SDGs 1 sampai dengan SDGs 18. Untuk pelatihan yang pesertanya adalah level pimpinan, dalam hal ini kepala desa, diperlukan improvisasi penyampaian materi sehingga dimungkinkan tidak timbul kesalahpahaman. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi, keberlanjutan program akan dilaksanakan melalui DPMD Kabupaten Belu.

Referensi

- Gafar, T. F., Suryaningsih, Zamhasari, & Krisnawansyah, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3): 207-218.
- Hendarwiandi. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten

- Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, 8(2): 663-676.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2020). *Tentang Indeks Desa Membangun*. <https://Idm.Kemendes.go.id/View/Detail/1/Tentang-Idm>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*.
- Manalu, M. (2018). *Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*. Universitas Medan Area.
- Ngoyo, M. F. (2015). *Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*. *Sosioreligius*, 1(1): 77-88.
- Patimah, N. (2018). *Evaluasi dalam Manajemen Diklat*. *An-Nidhom Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1): 50-68.
- Sarpin. (2017). *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1): 1-9.
- Suharman, Y., Sejati, S. P., & Pratama, D. A. (2021). *Peningkatan Pengetahuan tentang Pembangunan Berkelanjutan Menggunakan Media Cerita Bergambar di Tingkat Sekolah Dasar*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5): 1232-1239.